

KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Oleh
Juni Eko Setyawan

Abstract

Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Perspektif Stakeholder dengan indikator pengelolaan aset negara yang optimal, Perspektif Pelanggan dengan indikator administrasi dan keamanan aset negara yang akuntabel, dan pengawasan dan kontrol yang efektif, Perspektif Proses Internal dengan indikator studi kualitas dan kebijakan serta jaminan kepastian hukum, Layanan Prima, Peningkatan Pemahaman Publik di Bidang Kekayaan Daerah, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Peningkatan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Kemampuan Properti Daerah dan akhirnya Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dengan indikator Peningkatan Pemahaman Karyawan di Bidang Manajemen Properti Regional, Pengembangan Organisasi yang Andal dan Modern, Realisasi Tata Kelola yang Baik, dan Sistem Informasi Kekayaan Regional yang Andal menunjukkan hasil yang baik. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa Kebijakan Manajemen Properti Daerah di Kabupaten Ponorogo jika kita menganalisisnya dengan teori Balance Score Card menunjukkan bahwa itu secara keseluruhan baik.

Keyword: *Kartu Skor Skor, Properti Daerah, Kabupaten Ponorogo*

Pendahuluan

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) salah satunya pengelolaan Asset Daerah sangat penting untuk mewujudkan 3 T yakni Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum yang merupakan Strategic Asset Management yang didalam pelaksanaannya mensinergikan antara fungsi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban, selanjutnya diharapkan akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Ibu Sri Mulyani pada SindoNews.Com tanggal 27 September 2018 mengatakan bahwa barang milik negara (BMN) mencerminkan peradaban suatu negara. Selain itu, mencerminkan kemampuan suatu negara merencanakan dengan baik dan bagaimana suatu Kementerian dan Lembaga (K/L) mengelola pembangunan dengan kualitas yang bagus.

Berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku Pengelola Barang Nomor : 188.4/005/405.27/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pe-natausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu, Penyimpan Barang/ Penyimpan Barang Pembantu dan Atasan Langsung

Pengurus Barang/ Pengurus Barang Pembantu /Penyimpan Barang/ Penyimpan Bar-ang Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019 sebagai Bagian dari Proses Internal Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka melakukan pengorganisasian yang akan melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo.

Dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara tahun 2012-2018 idealnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari Manajemen Pengelolaan Keuangan Pemerintah sudah berjalan dengan sangat baik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun dalam kenyataannya masih banyak problematika dan temuan atas kurang berjalannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sehingga saat dilakukan audit banyak ditemukan berbagai kelemahan dan kasus mal-administrasi yang masih terjadi. Hal itu

sangat mengkhawatirkan jika diperhatikan lebih lanjut mengingat atas besarnya nilai Asset Tetap Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mencapai Rp. 2.573.185.745.657,32 di Tahun 2018.

Metode Penelitian

Penelitian bertujuan meng-hasilkan analisis Kebijakan Peng-elolaan Barang Milik Daerah dengan pendekatan Balance Score Card. Lebih jauh akan dianalisis Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo ditinjau dari aspek Perspektif Stakeholder, Customer Perspektif, Internal Bussines Process Perspektif dan Learning and Growth Perspektif. Manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengada-an, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pe-meliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indikator Pengelolaan ke-kayaan negara yang optimal di Kabupaten Ponorogo saat ini seiring dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang didapat dari BPK Republik Indonesia selama 7 tahun berturut-turut sudah baik. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain Pensertifikatan tanah-tanah asset bengkok Eks. Kelurahan yang bisa didayagunakan untuk meningkatkan PA dan juga reinventarisasi Barang Milik Daerah seperti Kendaraan Dinas dan yang dikuasai Pihak lain.

Indikator Pengawasan dan pengendalian yang efektif Barang Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo bahwa Upaya Yang Harus dilakukan oleh Pengelola Barang Milik Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Secara efektif dapat dilakukan dengan cara: (1) Menyusun aplikasi SSH untuk menjamin kepastian harga barang yang akan dibeli; (2) Pemasangan tanda asset daerah pada tanah dan bangunan yang menjadi asset Pemkab. Ponorogo; (3) Melakukan labeling Asset

secara terarah; (4) Menambah Jumlah Penilai Barang Milik Daerah; dan (5) Terhadap barang yang sudah tidak bisa dipakai dilakukan penghapusan untuk optimalisasi kinerja SKPD.

Indikator Kajian dan Kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo masih dalam proses melakukan kajian dan menyusun Kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator Pelayanan Prima Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo berada pada skala 71-85 dalam kategori Baik. Indikator Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Bidang Kekayaan Daerah di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa upaya yang diambil dalam rangka peningkatan pemahaman Masyarakat dibidang Kekayaan Negara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara (1) Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah; (2) Pemasangan papan Borm (Papan) Tanda Tanah Milik Negara; (3) Mengadministrasikan dengan baik atas pemakaian tanah milik daerah.

Indikator Peningkatan Efisi-ensi dan efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah di Kabupaten Ponorogo langkah konkrit Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara: (1) Mulai ditata Asset-Asset kita kemudian kita tertibkan untuk Asset yang tidak bergerak untuk di sertifikatkan dan khususnya Eks. Bengkok yang belum tersertifikat; (2) Membuat suatu Data Base BMD yang berisi data Asset Tetap total perjenis dan perkelompok yang di integrasikan antara server di BPPKAD dengan SKPD berisi data asset tetap; (3) Menyediakan ang-garan yang cukup guna optimalisasi pengelolaan BMD; (4) Meningkatkan capabilitas Aparatur Pelaksana dengan diklat; dan (6) Membangun sinergi dengan BPKP untuk pendampingan.

Indikator Peningkatan Mo-nitoring dan Evaluasi serta Ke-patuhan Pelaporan Barang Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo beberapa langkah yang ditempuh dilakukan melalui: (1) Mengadakan

BIMTEK Pengurus Barang kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah; (2) Membuat Surat Permintaan Laporan RKBU, Semesteran kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (3) Merekonsiliasikan Belanja Modal disetiap bulan; dan (4) Monitoring ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penutup

Penelitian yang telah di-lakukan mengenai Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo seiring dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK RI atas LKPD antara tahun anggaran 2012-2018 secara keseluruhan baik wawancara maupun analisa terhadap kuesioner diperoleh hasil yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari segi Manajemen Strategis sektor Publik dalam rangka mencapai Good Governance sudah sangat baik dan memenuhi standart.

Semua Pihak baik Eksekutif, Legislatif, Lembaga Sosial/ Keagamaan ataupun instansi vertical sepakat Bahwa kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo berjalan baik relevan dengan opini WTP 7 tahun berturut-turut. Meskipun demikian haruslah tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah secara penuh.

Permasalahan terkait tata-kelola Barang Milik Daerah khususnya asset daerah sangatlah kompleks seiring dengan per-kembangan daerah tersebut. Dapat kita contohkan apabila pemerintah daerah mempunyai sebidang tanah di Pusat Kota yang masih kosong namun belum diberikan papan borm dan diurus sertifikat kepemilikannya yang terjadi maka saat ada Pihak lain yang mengaku bahwa sebagai pemilik syah tanah yang sebenarnya asset pemerintah daerah tersebut akan sulit untuk dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya tertib administrasi karena akan menciptakan tertib secara aspek hukum.

Daftar Pustaka

Agustino Leo, 2008. Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung: Alfabeta.

Alif Haidir Adana. 2019. Penelitian Terdahulu. Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

AR. Mustopadidjaya (2002), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta:LAN

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.2019.Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. https://surabaya.bpk.go.id/?page_id=18473, 14 Juli 2019, pk.07.58 WIB.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018.Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo. 2012. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo. 2014. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo. 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo. 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo. 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Cahyawati. 2010. Penelitian Terdahulu. Tinjauan implementasi Peraturan

- Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah terhadap penggunaan tanah dan atau bangunan milik dinas Polres Gunungkidul oleh Yayasan Kemala Bhayangkari cabang Gunungkidul.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2004. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dewi Nurani.FISIP UI. 2009. Kebijakan Publik. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T%2026794-analisis%20implementasi-Literatur.pdf>, 20 Mei 2019, pk. 14.39 WIB.
- Dollar Sevtime M. 2017. Penelitian Terdahulu. Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau).
- Drs. Adi Purwanto, MM, MA.. 2016. PENGERTIAN MENURUT PARA AHLI. <https://edugovindonesia.com/web/component/content/article/2-uncategorized/27-pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli>, 20 Mei 2019, pk. 14.33 WIB.
- Erki Arfianto. 2018. Penelitian Terdahulu. Analisis Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Dengan Pendekatan Balanced Scorecard.
- Kaplan dan Norton "Using The Balanced scorecard as a Strategik Management Sitem," Harvard Business Review (Januari-Februari 1996) :77.
- Kaplan, Robert S. dan Norton, David P., 1996, The Balanced Scorecard : Translating Strategy Into Action, Massachusetts, Harvad Business Review.
- Kementereian Keuangan. 2004. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta. Kementerian Keuangan.
- Kementereian Keuangan. 2006. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta. Kementerian Keuangan.
- Kementereian Keuangan. 2014. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta. Kementerian Keuangan.
- Kementereian Dalam Negeri. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2015. Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 . Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2018. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Materi Bimtek Non Perpajakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2018. Pengertian, Paradigma dan Regulasi Barang Milik Daerah. , Kementerian Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mulyadi. 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba. Empat. Jakarta.
- Najmatuzzahrah. 2018. Penelitian Terdahulu. Evaluasi Pengembangan Balanced Scorecard pada Badan Pemeriksa Keuangan.
- Neli Yuliana. 2018. Penelitian Terdahulu. Evaluasi Implementasi Strategi pada Organisasi Pemerintah Menggunakan Balanced Scorecard Studi pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rina Anggraeni. 2018. *Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Pengelolaan Barang Milik Negara*. <https://ekbis.sindonews.com/read/1341575/34/sri-mulyani-tekankan-pentingnya-pengelolaan-barang-milik-negara-1537983589>, 27 September 2018, pk. 00.40 WIB.
- Setiadi, Nugroho J. 2003, *Perilaku Konsumen*. Kencana. Jakarta.
- Siti Istiqomah. 2017. *Penelitian Terdahulu. Analisis Kinerja PDAM Kabupaten Sleman Berdasarkan Perspektif Balanced Scorecard*.
- Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: CV Alvabeta.
- Turhindayani. 2017. *Penelitian Terdahulu. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)*.
- Uin Suska Lampung. N Nufus. 2018. *Pengelolaan Asset*. https://respository.uin-suska.ac.id/13506/7/7.%20BAB%20I_2018267ADN.pdf, 21 Mei 2019, pk. 15.22 WIB.
- Universitas Lampung. 2015. *Kebijakan Publik*. <https://digilib.unila.ac.id/5118/15/BAB%20II.pdf>, 21 Mei 2019, pk. 15.11 WIB.
- Universitas Sumatera Utara. 2007. *Kebijakan Publik*. https://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf, 20 Mei 2019, pk. 14.35 WIB.
- Wahyudin Nor.2012.*Penerapan Balanced Score Card Pada Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya. Vol 7, No. 2, Juli 2012.*
<https://www.google.com/search?q=penulisan+daftar+pustaka+dari+jurnal&oq=penulisan+daftar+pustaka+dari+jurnal&aqs=chrome..69i57j0l5.17327j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, 20 Mei 2019, pk. 14.41 WIB.
- Widodo J. Pudjirahardjo. 1999. *pengertian kebijakan*. <https://www.kebijakankesehatan.co.cc/2009/09/pengertian-kebijakan.html>, 20 Mei 2019. pk. 14.30 WIB.
- Yogy Ikhwanto. 2016. *Penelitian Terdahulu. Pengembangan Desain Instrumen Pemantauan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Yusuf Adhi Prabowo. 2017. *Penelitian Terdahulu. Analisis Penatausahaan Aset Tetap Dan Penerapannya Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah (Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo)*.